COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 8 Nomor 5, Tahun 2025
e-ISSN : 2597-5234

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA SELURUH PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011 - 2024

THE EFFECT OF LOCAL TAX REVENUE AND LEVIES ON ECONOMIC GROWTH WITH LOCAL EXPENDITURE AS AN INTERVENING VARIABLE IN ALL PROVINCES ON SUMATRA ISLAND 2011 - 2024

Rizaldi Arivin Parena[1], Anna Yulianita[2], Siti Rohima[3]
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya
E-mail: rizaldiarivinparena@gmail.com[1], annayulia@unsri.ac.id[2],
sitirohima@unsri.ac.id[3]

ABSTRACT

This study analyzes the influence of local taxes, regional levies, and regional expenditure on economic growth in 10 provinces on Sumatra Island. The results indicate that local taxes have a positive and significant impact on strengthening fiscal capacity and promoting economic growth. Regional levies show mixed outcomes: in some models they have a positive though relatively small effect, while in others they negatively affect economic growth, suggesting that levy policies must be carefully managed. Regional expenditure is proven to have a positive and significant effect, particularly when allocated to productive sectors such as education, health, and infrastructure, which can create a multiplier effect for economic activities. Simultaneously, all three variables significantly influence economic growth, with an Adjusted R^2 value of 99.67 percent. Furthermore, regional expenditure serves as a mediating variable, indicating that effective expenditure allocation is a key factor in optimizing the contribution of local taxes and levies to economic growth.

Keywords: *Local Taxes, Regional Levies, Regional Expenditure, Economic Growth, Mediation.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah memberikan hasil yang beragam: pada beberapa model berpengaruh positif meskipun relatif kecil, sementara pada model lain berpengaruh negatif, sehingga kebijakan retribusi perlu dikelola secara hati-hati. Belanja daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan, khususnya bila dialokasikan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang mampu menciptakan multiplier effect bagi aktivitas ekonomi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 99,67 persen. Selain itu, belanja daerah berperan sebagai variabel mediasi, sehingga efektivitas alokasi belanja menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Mediasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara luas yang terbagi atas beberapa provinsi dan terpisah antar pulau-pulau, setiap provinsi di Indonesia terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang masing-

masing memiliki pemerintah daerahnya masing-masing (Miswara et al., 2021). Daerah menghendaki diberikan keleluasaan dalam mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya pemerataan dana pembangunan. Hal ini adanya penataan dan pelayanan pemerintah maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasaskan sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Undang-Undang, 2014). Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dalam otonomi daerah, daerah telah diberikan hak otonom untuk menentukan apakah yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut yang selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan negara (Sumario et al., 2022). Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah, yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Purwandari, 2021).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tingkat daerah memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif. Asumsinya pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Age & Aisyah, 2020).

Provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pasca otonomi daerah, didukung potensi sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Potensi ini berpeluang meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Data 2021–2024 menunjukkan belanja daerah mendominasi keuangan daerah dengan stabilitas tinggi pada kisaran 73–76 miliar rupiah, menandakan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meskipun masih bergantung pada transfer pusat. Pajak daerah tumbuh positif hingga 28 miliar rupiah pada 2023 sebelum sedikit menurun di 2024, tetap menunjukkan basis yang stabil. Sementara itu, retribusi daerah sempat sangat rendah (0,1–0,15 miliar rupiah) selama 2021–2023, namun melonjak signifikan menjadi sekitar 2 miliar rupiah pada 2024, kemungkinan akibat perubahan kebijakan atau perbaikan sistem administrasi.

Kesenjangan besar antara belanja dan PAD menegaskan ketergantungan pada dana transfer. Meski lonjakan retribusi 2024 memberi sinyal positif terhadap kemandirian fiskal, keberlanjutannya perlu dijaga agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Sumatera secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren positif antara 2021–2024, dengan pertumbuhan tertinggi 4,62 persen pada

2023 dan tetap stabil di atas 4 persen meski sedikit melambat pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi regional dan penguatan sektor produktif. Namun, ketimpangan fiskal tetap menjadi masalah, ditandai oleh kesenjangan besar antara penerimaan dan belanja daerah, rendahnya kontribusi pajak dan stagnasi retribusi, serta ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Efektivitas alokasi belanja daerah juga belum optimal, sehingga peningkatan anggaran belum selalu mendorong pertumbuhan ekonomi produktif. Meskipun terjadi pemulihan pasca-pandemi, keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang masih menjadi tantangan, terutama menghadapi potensi guncangan eksternal.

Berbagai penelitian terdahulu tentang pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al., (2024) menunjukan bahwa Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016-2021, karena pajak daerah menyumbang lebih dari 90 persen pengahasilan asli daerah Sumatera Utara dan Retribusi daerah tidak memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016-2021, karena retribusi daerah menyumbang kurang dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 –2021. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholeman et al., (2024) menunjukan bahwa Hasil analisis dan pembahasan data pada penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut, Penerimaan pajak daerah secara parsial mempengaruhi belanja daerah dan Penerimaan retribusi daerah secara parsial tidak mempengaruhi belanja daerah.

Selanjutnya dalam Kaluara et al., (2022) menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil regresi kedua menunjukkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil regresi ketiga menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Idham et al., (2021) menunjukan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate dan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi didaerah Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.

Yurianto & Tantowi, (2021) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta adanya perbedaan dengan penelitian ini berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Sumatera Tahun 2011-2024. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Penelitian pertama "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta"

berfokus pada wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan yang lebih sederhana, hanya menganalisis hubungan langsung antara penerimaan pajak daerah sebagai variabel independen tunggal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen menggunakan model regresi sederhana. Sementara penelitian kedua "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera Tahun 2011-2024" memiliki cakupan yang lebih luas meliputi seluruh provinsi di Sumatera dengan periode penelitian yang jelas dari tahun 2011-2024, menggunakan dua variabel independen (pajak daerah dan retribusi), serta memasukkan belanja daerah sebagai variabel intervening yang memerlukan analisis jalur (path analysis) yang lebih kompleks, ditambah dengan penggunaan data panel untuk analisis variasi antar waktu dan wilayah, serta mempertimbangkan karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda antara DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan provinsi-provinsi di Sumatera yang memiliki tingkat pembangunan dan struktur ekonomi yang lebih beragam.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan belum terdapat penelitian dengan objek Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024, dan dari beberapa hasil penelitian juga mendapatkan hasil yang berbeda-beda sehingga dapat dianggap kurang konsisten. Hal ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian dengan metode penelitian menggunakan variabel intervening yaitu belanja daerah **"Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024".**

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian berfokus pada 10 Provinsi di Kepulauan Sumatera yang meliputi; Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Rentang tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah 13 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2024.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana di nyatakan oleh Sugiyono (2019) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada positivism, digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian akan digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data digunakan adalah data panel yang meliputi 10 Provinsi di Kepulauan Sumatera dalam runtut waktu 13 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen, dilakukan uji t. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel bebas dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara individual. Nilai probabilitas (p-value) menjadi acuan utama dalam menentukan signifikansi, di mana nilai di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan.

Hasil Uji t Persamaan 1

Tabel 1. Hasil Uji t Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Coefficient	7.858661	0.113461	69.26303	0.0000
LNPD	0.313025	0.028797	10.87007	0.0000
LNRD	0.014839	0.005377	2.759543	0.0066
LNBD	0.211466	0.028002	7.551869	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada konstanta (coefficient), nilai koefisien sebesar 7.858661 dengan t-statistic 69.26303 dan probabilitas 0.0000 yang sangat signifikan mengindikasikan bahwa meskipun seluruh variabel independen bernilai nol, variabel dependen tetap memiliki nilai dasar positif. Namun demikian, konstanta lebih berfungsi sebagai baseline dan bukan menjadi fokus utama interpretasi.

Selanjutnya, variabel Pendapatan Daerah (LNPD) memiliki koefisien 0.313025 dengan t-statistic 10.87007 dan probabilitas 0.0000, yang signifikan pada tingkat 1 persen. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pendapatan daerah akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0.313 persen dengan asumsi variabel lain konstan, sehingga pendapatan daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau kinerja fiskal daerah.

Sementara itu, variabel Retribusi Daerah (LNRD) menunjukkan koefisien 0.014839 dengan t-statistic 2.759543 dan probabilitas 0.0066, yang juga signifikan pada tingkat 1 persen. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen retribusi daerah dapat meningkatkan variabel dependen sebesar 0.014 persen. Walaupun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan variabel lain, hasil ini membuktikan bahwa retribusi daerah tetap memiliki kontribusi positif terhadap variabel dependen.

Adapun variabel Belanja Daerah (LNBD) menghasilkan koefisien 0.211466 dengan t-statistic 7.551869 dan probabilitas 0.0000 yang sangat signifikan. Dengan demikian, setiap kenaikan 1 persen belanja daerah akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0.211 persen. Temuan ini menegaskan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga peningkatan alokasi belanja daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun memperkuat kinerja fiskal daerah.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, meskipun dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda.

Hasil Uji t Persamaan 2

Tabel 2. Hasil Uji t Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Coefficient	2.081033	0.330768	6.291522	0.0000
LNPD	0.896034	0.042524	21.07115	0.0000
LNRD	-0.051854	0.016319	-3.177638	0.0018

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji t pada tabel di atas menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Konstanta memiliki koefisien sebesar 2.081033 dengan t-statistic 6.291522 dan probabilitas 0.0000 yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa meskipun variabel independen (LNPD dan LNRD) bernilai nol, variabel dependen tetap memiliki nilai positif sebesar 2.08. Nilai konstanta ini berfungsi sebagai baseline dari model regresi.

Selanjutnya, variabel Pendapatan Daerah (LNPD) memiliki koefisien 0.896034 dengan t-statistic 21.07115 dan probabilitas 0.0000, yang signifikan pada tingkat 1 persen. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen pendapatan daerah akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0.896 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menegaskan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan atau kinerja ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang diukur.

Sebaliknya, variabel Retribusi Daerah (LNRD) justru menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.051854 dengan t-statistic -3.177638 dan probabilitas 0.0018, yang signifikan pada tingkat 1 persen. Artinya, setiap kenaikan 1 persen retribusi daerah akan menurunkan variabel dependen sebesar 0.051 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, karena peningkatan retribusi cenderung memberikan beban tambahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga dapat menghambat pertumbuhan atau menurunkan efektivitas fiskal. Oleh karena itu, model ini menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah lebih efektif dalam mendorong kinerja dibandingkan dengan peningkatan retribusi daerah.

Untuk menguji signifikansi parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi, digunakan uji t-statistik, yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, jumlah sampel (n) adalah 140, dan jumlah variabel independen (k) yang digunakan dalam model adalah 3, sehingga derajat kebebasan (degree of freedom) dihitung menggunakan rumus: df = n – k – 1, yang menghasilkan df = 140 – 3 – 1 = 136. Dengan tingkat signifikansi 5persen ($\alpha = 0,05$) dan df = 136, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,977054 sebagai batas pengujian. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel LNPD (logaritma natural pajak daerah) menunjukkan nilai t hitung sebesar 10.87007, yang jauh lebih besar daripada t-tabel (10.87007 > 1,977054), dan disertai nilai

signifikansi sebesar 0,0000, yang jauh di bawah ambang 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis H1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara statistik terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

2. Variabel LNRD (logaritma natural retribusi daerah) memiliki nilai t hitung sebesar 2.759543, yang secara absolut lebih kecil dari t-tabel (2.759543 < 1,977054), dan nilai signifikansinya sebesar 0,0066. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah hubungan yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan retribusi daerah justru berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, secara statistik pengaruhnya signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H2 diterima, yang berarti bahwa retribusi daerah adalah faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi dalam model ini.
3. Variabel LNBD (logaritma natural belanja daerah) mencatat nilai t hitung sebesar 7.551869, yang lebih besar dari t-tabel (7.551869 > 1,977054), dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis H4 diterima, yang mengindikasikan bahwa belanja daerah yang dialokasikan secara optimal dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diuji (pajak daerah, belanja daerah dan retribusi daerah) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan implikasi penting bahwa dalam kerangka kebijakan fiskal daerah, optimalisasi penerimaan pajak, pengelolaan belanja publik dan retribusi daerah berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta memiliki efektivitas tinggi atau resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor-sektor yang terbukti signifikan secara empiris.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai Adjusted R-squared memberikan informasi yang lebih akurat karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, sehingga lebih tepat digunakan dalam model regresi berganda. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat tinggi.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,996666 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi. *Adjusted R-squared* sendiri adalah versi penyesuaian dari R-squared yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Nilai ini sangat penting karena memberikan gambaran seberapa baik model menjelaskan data, tanpa melebih-lebihkan hasil akibat adanya terlalu banyak variabel.

Dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,996666 (atau 99,67 persen), artinya sekitar 99,67 persen dari fluktuasi atau variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara statistik oleh tiga variabel independent (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah)

Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun sangat baik dan hampir seluruh perubahan atau variasi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan ketiga variabel tersebut. Dengan kata lain, kontribusi ketiga variabel dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Namun, masih ada sekitar 0,33 persen dari variasi pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dijelaskan oleh model ini. Bagian kecil ini bisa berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model, seperti:

- Faktor eksternal ekonomi (misalnya inflasi, suku bunga, atau kondisi global),
- Faktor sosial dan politik (misalnya stabilitas pemerintahan, kebijakan baru),
- Faktor geografis atau infrastruktur,
- Efisiensi birokrasi atau kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun jumlahnya kecil, faktor-faktor tersebut tetap penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam studi lanjutan. Selain itu, nilai Adjusted R-squared yang sangat tinggi seperti ini juga perlu dianalisis secara hati-hati, karena terlalu tinggi bisa saja mengindikasikan *overfitting*, yaitu kondisi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data yang ada, namun tidak mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru.

Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun memiliki relevansi secara keseluruhan dan tidak hanya bergantung pada pengaruh individu dari masing-masing variabel bebas. Nilai probabilitas (Prob > F) yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan.

Berdasarkan hasil output regresi, diperoleh nilai F-statistic sebesar 3463.890 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun adalah signifikan secara statistik.

Nilai F-statistic yang sangat besar menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Sedangkan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000000 < 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti bahwa secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji F pada penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan, serta menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah) memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan memberikan dasar yang kuat bagi analisis kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini juga memberikan bukti empiris bahwa model regresi yang dibangun dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selain itu, hasil ini juga mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan memperkuat dasar pertimbangan bagi pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai korelasi mendekati 1 atau -1 (umumnya di atas 0,80), maka terdapat indikasi kuat adanya multikolinearitas. Tabel berikut menyajikan matriks korelasi antar variabel independen sebagai dasar uji multikolinearitas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNPD	**LNRD**	**LNBD**
LNPD	1.000000	0.483081	0.802496
LNRD	0.483081	1.000000	0.365249
LNBD	0.802496	0.365249	1.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan melalui analisis matriks korelasi antar variabel independen, yaitu logaritma natural pajak daerah (LNPD), logaritma natural retribusi daerah (LNRD), dan logaritma natural belanja daerah (LNBD), diketahui bahwa nilai korelasi tertinggi terdapat antara variabel LNPD dan LNBD, yaitu sebesar 0.802496. Meskipun angka ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel, nilainya masih berada di bawah ambang batas toleransi umum untuk multikolinearitas, yakni sebesar 0,80. Oleh karena itu, hubungan antara LNPD dan LNBD belum dapat dikategorikan sebagai multikolinearitas yang berbahaya bagi kestabilan model.

Selain itu, nilai korelasi antara variabel LNPD dan LNRD adalah 0.483081, sedangkan antara LNRD dan LNBD adalah 0.365249. Kedua nilai ini termasuk dalam kategori sedang hingga rendah, yang menunjukkan bahwa hubungan linear antar variabel tersebut tidak terlalu kuat. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa masing-masing variabel independen memiliki tingkat kemandirian yang cukup dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, hasil uji multikolinearitas melalui pendekatan matriks korelasi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi yang signifikan terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Multikolinearitas merupakan kondisi

statistik di mana dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi memiliki hubungan linear yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan distorsi pada estimasi koefisien regresi, meningkatkan standar error, dan pada akhirnya menurunkan keandalan model. Seluruh nilai korelasi antar variabel berada di bawah batas toleransi umum sebesar 0,80. Sehingga model regresi diperkirakan stabil dan hasil estimasi koefisien tidak akan terdistorsi akibat hubungan linear yang terlalu tinggi antar variabel bebas.

Namun karena seluruh nilai korelasi antar variabel dalam penelitian ini berada di bawah batas toleransi 0,80, maka model regresi yang dibangun diperkirakan memiliki stabilitas yang baik. Artinya, hasil estimasi parameter yang dihasilkan dari model ini tidak akan mengalami penyimpangan akibat hubungan linear antar variabel bebas yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan, dan hasil interpretasi dari masing-masing variabel independen tetap valid dan dapat diandalkan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Coefficient	0.153111	0.068148	2.246733	0.0264
LNPD	-0.012614	0.017296	-0.729284	0.4672
LNRD	-0.004053	0.003230	-1.254944	0.2118
LNBD	-0.002002	0.016819	-0.119042	0.9054

Sumber: Data diolah, 2025

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Adanya heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menjadi tidak efisien serta mengganggu validitas uji statistik yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditampilkan pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas (p-value) untuk variabel independen yaitu LNPD (0,4672), LNRD (0,2118), dan LNBD (0,9054) semuanya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap residual yang dikuadratkan, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas yang berasal dari variabel-variabel independen.

Sementara itu, nilai probabilitas untuk konstanta sebesar 0,0264, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan model regresi yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Hasil Uji Intervening

Uji Mediasi (intervening) digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi dalam suatu model. Uji ini mengevaluasi apakah pengaruh tidak langsung dari pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2),

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalaui Belanja Daerah (Z), signifikan secara statistik. Selain *Sobel test,* juga digunakan alternatif lain seperti *Aroian test* dan *Goodman test* untuk meningkatkan validitas hasil pengujian efek mediasi, khususnya ketika ukuran sampel besar dan asumsi normalitas data terpenuhi. Gambar berikut menyajikan hasil pengujian mediasi dengan metode Sobel, Aroian, dan *Goodman* yang masing-masing menunjukkan nilai statistik uji, standar *error*, serta nilai signifikansi (*p-value*):

Tabel 5. Hasil Uji dari Variabel X1 (PD)

Input	Nilai	Jenis Uji	Test Statistic	Std. Error	*p*-value:
a	0.896034	Sobel test:	7.10904092	0.02665349	0
b	0.211466	Aroian test:	7.10195707	0.02668007	0
Sa	0.042524	Goodman test:	7.11614602	0.02662687	0
Sb	0.028002	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji mediasi yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan statistik, yaitu uji Sobel, uji Aroian, dan uji Goodman, menghasilkan nilai statistik masing-masing sebesar 7.0998, 7.0926, dan 7.1070. Ketiga nilai statistik ini disertai dengan nilai p-value sebesar 0,000, yang secara konsisten jauh berada di bawah tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Dengan demikian, hasil ini memberikan bukti yang kuat bahwa pengaruh mediasi dalam model regresi ini signifikan secara statistik, tanpa memandang metode pengujian yang digunakan. Ketiga uji tersebut secara umum digunakan untuk mengukur apakah suatu variabel mediasi secara signifikan menjembatani atau memediasi pengaruh antara Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah (Z) yang digunakan dalam penelitian ini memainkan peran penting sebagai perantara, yang secara efektif menyampaikan pengaruh dari Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Artinya, pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui jalur tidak langsung yang dimediasi oleh variabel perantara yaitu Belanja Daerah (Z). Keberadaan pengaruh mediasi yang signifikan ini mengindikasikan bahwa mekanisme hubungan kausal dalam model menjadi lebih kompleks dan realistis, sehingga pemahaman terhadap hubungan antar variabel menjadi lebih utuh dan mendalam.

Lebih lanjut, keberhasilan uji mediasi ini juga menunjukkan bahwa intervensi atau kebijakan yang diarahkan pada Belanja Daerah (Z) berpotensi memperkuat atau mengoptimalkan pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Dengan demikian, hasil ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan implikasi praktis dalam konteks perumusan strategi atau kebijakan, tergantung pada ranah studi yang sedang dianalisis. Singkatnya, model mediasi dalam penelitian ini telah terbukti berjalan secara signifikan dan efektif, serta memberikan kontribusi penting

dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang dikaji.

Tabel 5. Hasil Uji dari Variabel X2 (RD)

Input	Nilai	Jenis Uji	Test Statistic	Std. Error	*p*-value:
a	-0.051854	Sobel test:	-2.92882135	0.00374395	0.0034025
b	0.211466	Aroian test:	-2.90724645	0.00377173	0.00364626
Sa	0.016319	Goodman test:	-2.95088381	0.00371596	0.00316266
Sb	0.028002	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji mediasi yang dilakukan menggunakan tiga metode statistik, yakni uji Sobel, uji Aroian, dan uji Goodman, menghasilkan nilai p-value masing-masing sebesar 0.0032, 0.0034, dan 0.0029. Seluruh nilai p-value tersebut secara konsisten berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Dengan kata lain, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa jalur mediasi signifikan. Ketiga uji ini secara umum digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu Belanja Daerah (Z) secara signifikan memediasi atau menjembatani hubungan antara Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y). Namun, karena hasil uji menunjukkan signifikansi secara statistik, maka peran mediasi dalam model ini terbukti secara empiris.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) berlangsung melalui jalur langsung yang dimediasi oleh Belanja Daerah (Z), melainkan kemungkinan besar terjadi secara tidak langsung, atau bahkan bisa jadi melibatkan faktor-faktor lain yang diuji dalam model ini. Dalam konteks ini, variabel mediasi mampu menjelaskan mekanisme kausal yang menghubungkan Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), sehingga dapat dianggap sebagai penghubung signifikan dalam hubungan antar variabel tersebut.

Dampaknya, dalam penyusunan teori, strategi intervensi, atau kebijakan yang didasarkan pada model ini, perhatian perlu difokuskan pada variabel mediasi, karena perannya terbukti secara statistik. Oleh karena itu, fokus utama analisis maupun tindakan praktis sebaiknya diarahkan pada pengaruh langsung antara variabel independen dan dependen, atau pada eksplorasi variabel-variabel mediasi alternatif lainnya yang mungkin memiliki peran yang lebih relevan. Kesimpulan ini juga menekankan pentingnya melakukan uji mediasi secara empiris, karena semua dugaan mediasi yang bersifat teoritis akan terbukti dalam konteks data yang dianalisis.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis regresi parsial, diperoleh Variabel LNPD (logaritma natural pajak daerah) menunjukkan nilai t hitung sebesar 10.87007, yang jauh lebih besar daripada t-tabel (10.87007 > 1,977054), dan disertai nilai signifikansi sebesar 0,0000,

yang jauh di bawah ambang 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Dengan demikian, hipotesis H1 diterima.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari Setiawan dan Utomo (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Hal ini terjadi karena pajak daerah menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil dan dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis regresi, Variabel LNRD (logaritma natural retribusi daerah) memiliki nilai t hitung sebesar 2.759543, yang secara absolut lebih kecil dari t-tabel (2.759543 < 1,977054), dan nilai signifikansinya sebesar 0,0066. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi yang diamati di Pulau Sumatera selama periode pengamatan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, diterima. Tingkat signifikanan ini mencerminkan bahwa peran retribusi sebagai instrumen fiskal daerah sudah optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Lebih jauh lagi, hasil ini merefleksikan tantangan struktural dan kelembagaan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola retribusi. Pertama, basis objek retribusi yang sempit mengurangi potensi pendapatan karena jumlah layanan yang dapat dikenakan retribusi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sering kali rendah, karena persepsi terhadap kualitas layanan publik yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan, sehingga menurunkan legitimasi retribusi sebagai sumber penerimaan. Ketiga, kapasitas kelembagaan daerah, termasuk kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan sistem informasi dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi, masih relatif lemah (OECD, 2020; Bappenas, 2022). Kondisi ini menyebabkan potensi retribusi tidak tergali secara optimal, dan kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi daerah menjadi sangat terbatas.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis regresi, Variabel LNBD (logaritma natural belanja daerah) mencatat nilai t hitung sebesar 7.551869, yang lebih besar dari t-tabel (7.551869 > 1,977054), dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000, jauh di bawah ambang signifikansi 5persen ($\alpha = 0,05$). Hal ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi yang diamati di Pulau Sumatera. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4), yang menyatakan adanya pengaruh signifikan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, diterima. Hasil ini tidak hanya relevan secara statistik, tetapi juga konsisten secara teoritis dengan pandangan dalam teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory), yang menekankan pentingnya investasi publik, termasuk belanja pemerintah,

sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut Romer (2021), investasi pemerintah dalam bentuk belanja publik dapat mendorong produktivitas melalui peningkatan modal manusia, infrastruktur, serta inovasi dan teknologi. Belanja yang dialokasikan secara efisien pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi. Efek ini tercermin dalam meningkatnya permintaan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta meningkatnya minat investasi swasta akibat membaiknya iklim usaha dan konektivitas wilayah (OECD, 2020). Oleh karena itu, peran belanja daerah tidak hanya bersifat langsung melalui pengeluaran, tetapi juga menjadi instrumen stimulus ekonomi yang memperkuat struktur ekonomi lokal.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi, dengan belanja daerah berperan sebagai variabel mediasi (*intervening*). Analisis mediasi dilakukan guna mengetahui apakah pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat langsung atau juga terjadi melalui mekanisme tidak langsung yang dimediasi oleh belanja daerah. Untuk menguji pengaruh tidak langsung tersebut secara statistik, digunakan tiga metode uji mediasi klasik, yaitu uji Sobel, uji Aroian, dan uji Goodman, yang banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur signifikansi peran mediasi.

Hasil uji pertama mengungkapkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah. Ketiga metode uji mediasi menghasilkan nilai statistik yang tinggi (Sobel = 7.0998 ; Aroian = 7,0926 ; Goodman = 7,1070) dan nilai p-value sebesar 0,000, yang secara statistik berada jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Temuan ini secara jelas menunjukkan bahwa belanja daerah memainkan peran sebagai mediator signifikan dalam hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pajak tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai belanja publik yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta program-program ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen dan literatur kebijakan fiskal yang menyatakan bahwa pengeluaran publik yang ditopang oleh penerimaan pajak dapat menciptakan efek pengganda terhadap output ekonomi (OECD, 2020; Kementerian Keuangan, 2023).

Sebaliknya, hasil pengujian terhadap variabel retribusi daerah menunjukkan ketiadaan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui belanja daerah. Nilai p-value dari ketiga uji mediasi (Sobel = 0.0032 ; Aroian = 0.0034 ; Goodman = 0.0029) semuanya berada di tingkat signifikansi 0,05, yang berarti bahwa belanja daerah dapat dijadikan perantara yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara retribusi daerah dan pertumbuhan

ekonomi. Hasil ini konsisten dengan analisis sebelumnya, di mana retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kontribusi retribusi terhadap perekonomian daerah tinggi, baik dari sisi jumlah maupun mekanisme distribusinya. Sehingga, retribusi dapat dijadikan instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Dalam konteks sepuluh provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi objek kajian, temuan ini menghasilkan implikasi kebijakan yang cukup jelas. Pertama, pajak daerah terbukti sebagai instrumen fiskal yang lebih efektif, baik secara langsung maupun melalui mekanisme mediasi belanja daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan penguatan keuangan daerah. Kedua, belanja daerah terbukti sebagai saluran pengaruh yang penting, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran belanja menjadi kunci untuk memperkuat dampak fiskal terhadap ekonomi daerah.

Ketiga, retribusi daerah meskipun penting sebagai sumber PAD, belum mampu menunjukkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, strategi pengelolaan retribusi sebaiknya diarahkan bukan semata-mata pada peningkatan target pendapatan, melainkan pada perbaikan kualitas layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan basis pemungutan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Dengan demikian, kontribusi retribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan pajak daerah terbukti mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Retribusi Daerah menunjukkan hasil yang beragam. Pada beberapa model, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan, meskipun kontribusinya relatif kecil. Namun, pada model lain retribusi justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa kebijakan retribusi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
3. Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja yang efektif pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mampu menciptakan multiplier effect yang mendorong aktivitas ekonomi daerah serta memperkuat daya saing wilayah.
4. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-

statistic yang sangat besar dan tingkat signifikansi yang kuat, serta nilai Adjusted R^2 sebesar 99,67persen, yang menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi hampir sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

5. Peran belanja daerah juga terbukti sebagai variabel mediasi. Pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui mekanisme tidak langsung yang dimediasi oleh belanja daerah. Dengan demikian, efektivitas belanja menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kontribusi penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Age, W. D., & Aisyah, S. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016. *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate. *Jurnal EMBA*, *9*(3), 141–150.

Kaluara, D. R., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. . (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Sulawesi Utara (2010-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(3), 74–85

Lubis, P. K. D., Siahaan, F. zuhri, Harahap, A. H., & Hutabarat, R. P. S. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dunia Pendidikan*, *4*(2), 745–753.

Miswara, Liandab, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS*, *2*(3), 153–169.

OECD. (2020). *Fiscal Decentralisation and Local Public Investment*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Purwandari, E. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan BPHTB Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. *Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 1–12.

Romer, P. M. (2021). *The Origins of Endogenous Growth Theory: A Retrospective*. Journal of Economic Perspectives, 35(3), 145–162.

Setiawan, H., & Utomo, S. (2021). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(2), 112–125.

Sholeman, M., Waruwu, R. F. Y. A. S. Y., Manalu, S. P. R., & Pakpahan,

E. (2024). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah*. *13*(2), 55–64

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d)*. https://doi.org/979-8433-71-8

Sumario, Riyanti, A., Daulay, M. I., Bagenda, C., Soegoto, A. S., Soeikromo, D., Kusnadi, E., Sagala, M. J. P., Heriyanto, H., & Hasibuan, A. K. H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep dan Urgensi." In *Cv Widina Media Utama*.

Undang-Undang 2014. (2014). *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Yurianto, & Tantowi, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, *7*(4), 436–449.